

Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia

Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
Mahasiswa Magister Sejarah Peradaban Islam
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 20201021002@student.uin-suka.ac.id, 20201021008@student.uin-suka.ac.id.

Abstract

This paper examines the agreement between Indonesia and Malaysia which is a form of moderate Islamic attitude shown by the parties or community organizations that played a role at that time. In this study, the authors used a qualitative descriptive research method. The data analysis technique used is the technique proposed by Miles and Huberman, which consists of data reduction, data presentation, and conclusions. The resolution of the conflict that occurred between Indonesia and Malaysia is also known as Konfrontasi or "Down with Malaysia", this occurred because of the conflict in the Sabah and Sarawak regions. This dispute is a stage of Islamic politics in Indonesia so that it has an impact on the moderate attitude of Islamic politics in Indonesia. the involvement of Islamic Community Organizations in the policies heralded by Soekarno became an internal crisis in the Islamic political conditions at that time. Organizations that are quite influential and involved are the Masyumi Party, the NU Party, and the Ansor Youth Movement. In the conflict "G resolution of Malaysia" finally resulted in a peaceful resolution between the two parties with various agreements that occurred from 1963-1966, the agreement for the Sabah and Sarawak regions to be included in the territory of Malaysia.

Keywords: *Islamic Political Moderatism, Conflict Resolution, Masyumi Party, NU Party, Ansor Youth Movement.*

Pendahuluan

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang masih satu rumpun dan memiliki ikatan darah satu sama lain. Namun demikian, keduanya pernah mengalami suatu peristiwa kelam yang pahit untuk diungkapkan. Banyaknya persamaan dari kedua negara tersebut, antara lain: budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat.¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya merupakan saudara serumpun yang tidak dapat dipisahkan. Namun hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia dapat dikatakan mengalami pasang surut dan selalu diupayakan untuk tetap terjalin baik agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar dari peristiwa-peristiwa di masa lampau, terutama pada masa resolusi konflik yang berdampak pada sikap moderatisme politik Islam di Indonesia.

Moderatisme merupakan suatu penamaan konseptual yang tidak mudah untuk didefinisikan. Golongan ulama dan agamawan memiliki pandangan bahwa

¹ Bambang Bahagia Sulistiyono, *Konflik Indonesia-Malaysia dalam perspektif kebangsaan 1963-2010* (Jakarta; PT. Kanisius, 2020).

kata moderatisme memiliki makna pertengahan dan perebutan, dalam hal ini bergantung pada siapa, dan dimana kata tersebut didefinisikan.² Moderatisme dalam konteks agama dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, terutama dalam lokalitas tertentu. Jika dihubungkan dengan konteks politik, suatu konsep moderatisme berimplikasi pada pemaknaan pertengahan. Demikian dengan adanya pandangan Islam moderat dapat dipahami bahwa Islam menjadi suatu kepercayaan tertinggi dalam kehidupan beragama, dan keyakinan bahwa Islam memiliki kesesuaian di setiap masa (zaman). Ragam pemahaman terhadap pemaknaan moderatisme, penentuan salah satu perspektif yang menggambarkan bahwa langkah yang tidak bisa dihindari oleh Islam di Indonesia dalam perkembangannya adalah politik, mengingat bahwa semakin kompleksnya ketegangan sosial politik yang terjadi, memberikan dampak pada konteks kehidupan sosial politik di Indonesia.

Pergolakan politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peristiwa historis perkembangan pasca kemerdekaan, tepatnya masa kepemimpinan Soekarno. Dinamika politik era Soekarno menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan bagi kancah politik di dalam negeri, salah satu gerakan politik yang pernah dilakukan guna mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia adalah politik subversif. Dalam perkembangannya, era Soekarno memiliki karakteristik anti Barat dalam kebijakan-kebijakannya, hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa tahun 1962-1966 yang memperlihatkan bahwa adanya politik konfrontasi melawan Malaysia. Ia memiliki pandangan bahwa pendirian Federasi Malaysia sebagai sebuah kelanjutan dari pemerintah Barat yang ingin mengintervensi Malaysia dan Indonesia secara keseluruhan. Maka dari itu, pada masa Soekarno terjadi resolusi konflik antara Indonesia dan Malaysia.

Dinamika politik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia muncul akibat perbedaan interpretasi perkembangan yang awalnya timbul dari kecurigaan. Ketika dunia pada umumnya negara-negara Asia Tenggara mengalami sebuah pertentangan antara Blok Komunis dan Kapitalis. Sehingga adanya kecurigaan antara satu sama lain menjadi alasan yang kuat adanya perbedaan latar belakang sejarah terbentuknya kedua negara tersebut. Kemerdekaan yang didapatkan oleh Indonesia melalui perlawanan yang dilakukan kepada kolonialisme Barat, sedangkan pembentukan negara Malaysia didukung penuh oleh Inggris yang pada saat itu pernah menjajah dan berperan langsung dalam pemerintahan di Malaysia. Dukungan yang diberikan Inggris kepada Malaysia berlatar belakang untuk mempertahankan paham kapitalis. Kerangka berpikir orang-orang Barat, kaum nasionalisme identik dengan kolonialisme, sedangkan kaum komunisme, disamakan dengan Kapitalisme.³

² John L. Esposito, "Moderate Muslims: A Mainstream of Modernists, Islamist, Conservatives, and Traditionalist," *Amerika Journal of Islamic Social Sciences* 22, no. 3 (2005).

³ Kusuma Hadiningrat, *Sejarah operasi gabungan dalam rangka Dwikora* (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971).

Munculnya nasionalisme di Indonesia sejalan dengan perubahan yang terjadi pasca perang dunia kedua, jadi ada tuntutan arus gerakan nasionalisme dan tuntutan untuk kemerdekaan yang sudah tidak dapat dibendung lagi.⁴ Hal ini dikarenakan rakyat Indonesia pada saat itu sudah hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme yang lama berkuasa. Sehingga munculnya jiwa nasionalisme yang berimplikasi pada perlawanan sebagai upaya meraih kemerdekaan. Ada dua peristiwa penting yang terjadi bersamaan pada waktu itu, yaitu penyelesaian sengketa di Irian Barat tepatnya tanggal 1 Oktober 1962. Kemudian terjadi pemberontakan di Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962, yang akhirnya menyebabkan Malaysia curiga. Oleh karena itulah pemerintahan Persekutuan Tanah Malaya menganggap bahwa politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia bukan disebabkan oleh pembentukan Malaysia, melainkan akibat logis dari politik jangka panjang pemerintahan Indonesia.⁵

Terjadinya resolusi konflik antara Indonesia dan Malaysia yang berujung pada sikap konfrontasi antara keduanya, memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial masyarakat, ekonomi, dan agama. Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang masih serumpun dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Jika melihat kondisi sosial masyarakat Muslim saat terjadinya konfrontasi tentu mengalami dampak yang cukup terasa dalam kehidupannya, terutama masyarakat Muslim Indonesia yang turut dalam memperjuangkan kemerdekaan dari para penjajah dan paham-paham yang dianutnya. Beberapa organisasi masyarakat Muslim yang turut andil dalam resolusi konflik antara Indonesia dan Malaysia adalah Nahdhatul Ulama dan organisasi-organisasi yang lahir serta berkembang pada masa kemerdekaan. Saat terjadinya konflik antara Indonesia dan Malaysia, memberi dampak bagi politik internal Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari adanya sikap moderatisme politik Islam yang mencoba untuk mencari jalan tengah dari gejolak politik internal dan eksternal. Salah satu relawan dari organisasi masyarakat yang turut berperan adalah Ansor. Jadi saat terjadinya konfrontasi, Indonesia menggalang kekuatan besar dan melakukan serangan-serangan sporadis. Adapun demikian, dinamika politik dalam negeri tidak terkendali, sehingga beberapa organisasi masyarakat mencari jalan tengah untuk penyelesaiannya. Sedangkan negara juga mencoba menyelesaikan persoalan politik yang berkepanjangan. Keinginan untuk bebas dari paham Neo-Kolonialisme dan Neo-imperialisme sangat didukung oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga peristiwa konfrontasi antara Indonesia yang berangkat dari perjuangan untuk melawan penjajahan dengan Malaysia yang dijamin kemerdekaannya oleh Inggris tidak dapat dihindarkan, meskipun persoalan politik dalam negeri juga tidak terkendali. Sehingga mewujudkan adanya moderatisme partai politik Islam pada saat itu. Setiap keputusan yang ditentukan oleh

⁴ *Ibid.*

⁵ Kusuma Hadiningrat, *Sejarah operasi gabungan dalam rangka Dwikora* (Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971).

pemimpin tidak secara langsung diterima, terlebih ketika ada perbedaan dalam ideologinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada wujud moderatisme politik Islam Indonesia Era Soekarno: studi resolusi konflik Indonesia – Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lebih tepatnya jenis kajian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk memahami peristiwa historis yang terjadi di masa lampau. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur atau kepustakaan. Metode ini berorientasi pada pemanfaatan sumber literatur (studi pustaka) sebagai rujukan untuk memperoleh data penelitiannya.⁶ Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman.⁷ Dalam metode Miles dan Huberman terdapat tahapan penelitian yang meliputi: a) Reduksi data, b) Penyajian data, c) Kesimpulan (*verifikasi*).

Berpedoman pada gagasan diatas penulis mencoba untuk merekonstruksi suatu peristiwa besar yang terjadi antara dua negara yang masih satu rumpun pernah mengalami suatu peristiwa resolusi konflik yang berakibat pada sikap moderatisme partai politik Islam era Soekarno, adanya resolusi konflik yang muncul berakhir dengan resolusi damai antara kedua negera dengan perundingan-perundingan yang dilakukan. Sehingga keputusan final dari adanya konflik tersebut menetapkan bahwa wilayah Sabah dan Sarawak masuk dalam teritorial Malaysia. Meskipun, keputusan itu melalui proses panjang, yang awalnya juga berdampak pada pemutusan hubungan diplomatik, ekonomi dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

A. Latar Belakang Resolusi Konflik Malaysia vs Indonesia

Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan secara instan, melainkan melalui perjuangan yang luar biasa dari para pahlawan. Politik yang menjadi salah satu cara untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sempat memanas pada tahun 1960-an. Berbagai strategi diluncurkan oleh para penjajah kolonial untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan membagi wilayah-wilayahnya, dan mengadu domba rakyat-rakyat sesuku dan sebangsa didalamnya. Guncangan politik yang terjadi pada saat itu condong pada terpecahnya dua blok, yaitu Blok Barat yang dominan pada kapitalis, dan Blok Timur yang dominan dengan sosialis-komunis. Indonesia dan negara-negara sekitarnya, seperti: Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina merasakan adanya dampak dari peristiwa tersebut. Politik yang dianut oleh Indonesia pada saat itu ialah non-blok yang

⁶ M Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung; Alfabeta, 2015).

berarti tidak memihak blok manapun. Perlu diketahui bahwa pada waktu itu Indonesia sangat menentang neo-kolonialisme dan neo-imperealisme karena tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.

Pada saat itu, Malaysia yang sudah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, kurang lebih pada tahun 1957. Malaysia memiliki gagasan untuk menggabungkan negara bekas jajahan Inggris dalam satu wadah yang disebut dengan Persekutuan Tanah Melayu, kemudian dikenal sebagai Federasi Malaysia. Beberapa negara yang dicanangkan untuk masuk kedalam Federasi ini antara lain: Malaya, Sarawak, Sabah, Singapura, dan Brunei. Gagasan tersebut diumumkan oleh Tengku Abdul Rahman dalam kongres *The Foreign Correspondent's Association of South East Asia* yang ada di Singapura, tepatnya pada tanggal 27 Mei 1961.⁸ Pada saat itu pengaruh komunis tampak jelas di Vietnam dan Indonesia, akibat pengaruh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang semakin signifikan di dalam perpolitikan nasional pada akhir 1950-an. Kondisi tersebut menjadi ruang gagasan Federasi Malaysia dalam menjaga dan membendung arus komunisme. Di balik strategi pertahanan yang digunakan oleh Inggris tersebut sekaligus mendukung upaya Inggris dalam membentuk kesatuan mata rantai pertahanan dari Inggris, melalui Gibraltar, Aden, sampai ke Singapura, dan Hongkong.⁹

Adapun tujuan utama didirikannya federasi Malaysia yaitu untuk menyatukan bangsa Melayu, terutama dalam hal kerjasama dan kordinasi di bidang ekonomi dan politik, serta memperbaiki perimbangan jumlah penduduk sehingga golongan Cina tidak mendominasi seperti di Singapura, dan membendung arus persebaran pengaruh dari komunis.¹⁰ Inggris memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dilandasi atas aspek pertahanan dan ekonomi. Jika dilihat dari kepemimpinan serta dominasi kekuasaan di Malaya oleh Tuanku Abdul Rahman terlihat lebih pro-Barat, sehingga Inggris juga mendukung dibentuknya Federasi Malaysia.¹¹

Sebelum terjadinya konflik antara Indonesia dan Malaysia yang berujung pada sikap konfrontasi, terlihat perkembangan terbentuknya Federasi Malaysia yang melakukan beberapa perundingan dengan negara-negara yang dimasukkan didalamnya. Ada pro-kontra dari terbentuknya Federasi Malaysia, sehingga pada akhirnya dilakukan usaha-usaha untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Salah satunya melalui diplomasi. Terbentuknya Federasi Malaysia menjadikan adanya

⁸ Kusuma Hadiningrat, *Sejarah operasi gabungan dalam rangka Dwikora* (Jakarta; Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971).

⁹ Diandra Megaputri Mengko, "Intelijen Dan Konfrontasi Indonesia-Malaysia," in *Intelijen Dan Politik Era Soekarno*, ed. Ikrar Nusa Bhakti and dkk. (Jakarta: LIPI Press, 2018), 103–32.

¹⁰ Dinas Sejarah Militer TNI-AD, "*SEJARAH TNI-AD 1945-1973: Peran TNI-AD dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*" (Bandung: Dinas Sejarah Tentara Nasioal Indonesia Angkatan Darat 1985, 1985).

¹¹ Deshinta Nindya Ajingga, "Peran Angkatan Udara Republik Indonesia Dalam Operasi Ganyang Malaysia Di Kalimantan Tahun 1964-1966", Universitas Sebelas Maret, (2016).

ketegangan di kawasan internasional, khususnya negara-negara di wilayah Asia Tenggara antara lain seperti: Indonesia, Filipina, dan Persekutuan Tanah Melayu. Filipina berupaya melakukan pendekatan kepada Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu di Manila, tepatnya pada bulan Maret 1963.¹² Dari pertemuan konferensi itu menghasilkan ketetapan sebagai berikut: a) Sesuai persoalan yang timbul adanya gagasan Malaysia akan diselesaikan melalui cara yang damai, b) Akan diadakan pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia, Filipina, dan Persekutuan Tanah Melayu.¹³ Pada tanggal 27 Juli 1963 Soekarno menyatakan akan mengganyang Malaysia setelah sebelumnya terdapat beberapa aksi propaganda melawan Malaysia. Serangan-serangan sporadik telah dimulai dengan mengirimkan pasukan baik relawan maupun Tentara Nasional Indonesia. Tetapi berbagai serangan itu dapat ditanggulangi oleh Malaysia dan Inggris. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima Malaysia sebagai anggota yang tidak tetap, maka Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Tidak berhenti disitu, melainkan pasca adanya konferensi di Manila PBB secara tidak langsung ikut terlibat dalam penyelesaian persoalan yang terjadi.

Setelah PBB ikut serta dalam penyelesaian persoalan, yang kemudian di ikuti dengan pendirian Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Adapun demikian, sikap yang diambil oleh Indonesia pada saat itu ialah berusaha untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia, karena Indonesia menyadari pasca terbentuknya Federasi Malaysia akan terjadi adanya suatu negara boneka yang dibentuk oleh Inggris, yang saat itu pemerintah Indonesia menolak betul gerakan neo-kolonialisme dan neo-imperealisme.¹⁴ Pemerintahan Indonesia memiliki pendapat bahwa lahirnya Malaysia merupakan sebuah prinsipil yang memiliki pertentangan dengan politik Indonesia yang anti kolonialisme dan anti imperialisme.

Pasca pengesahan Federasi Malaysia di Kuala Lumpur, tepatnya pada tanggal 17 September 1963. Pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik secara sepihak dengan Malaysia. Sikap Indonesia memutuskan hubungan tersebut diikuti dengan pemutusan hubungan lintas ekonomi antara Indonesia dengan daerah yang masuk dalam kawasan Malaya dan Singapura. Tindakan itu dilancarkan sejak tanggal 21 September 1963. Ketidakharmonisan hubungan kedua negara tersebut berujung pada konfrontasi yang digencarkan Indonesia terhadap Malaysia, yang kemudian membuat Dewan Keamanan PBB melakukan sidang atas persoalan sengketa yang akhirnya bermuara pada rencana neara buatan yaitu Malaysia sampai kepadapembahasan yang tidak kunjung usai dan menemukan titik terang.

¹² Ajingga, "Peran Angkatan Udara Republik Indonesia Dalam Operasi Ganyang Malaysia Di Kalimantan Tahun 1964-1966".

¹³ Disjarahad, *Buku sejarah dokumenter: Konfrontasi terhadap Negara Federasi Malaysia dan Dwikora* (Bandung: Dinas Pusat Sejarah TNI, 1975).

¹⁴ Ajingga, "Peran Angkatan Udara Republik Indonesia Dalam Operasi Ganyang Malaysia Di Kalimantan Tahun 1964-1966".

Konfrontasi yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno pada Malaysia terus digencarkan, sebab Presiden Soekarno anti dengan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Konfrontasi tersebut dikumandangkan pada tanggal 13 Mei 1964, tepat pada saat terjadinya apel besar di depan Istana Merdeka Jakarta. Kemudian peristiwa tersebut dikenal sebagai Dwikora (Komando Rakyat). Dalam apel tersebut Presiden Soekarno menyampaikan mengenai ketahanan revolusi Indonesia, dan membantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat: Sabah, Malaya, Sarawak, Singapura, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka (Malaysia). Kemudian setelah terbentuknya Federasi Malaysia, Inggris memiliki wewenang untuk mendirikan pangkalan militer (pertahanannya) pada daerah Federasi Malaysia yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia. Hal tersebut secara tidak langsung dapat membahayakan dan mengancam keamanan bagi wilayah Indonesia.

Menurut Pour J (2002) terjadinya konflik antara Indonesia dengan Malaysia hanyalah akibat persaingan pribadi antara Soekarno dan Tengku, maka jelas bahwa konflik yang pernah terjadi tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan interpretasi dari kedua pemimpin tersebut. Perbedaan itu dapat dilihat dari pandangan Soekarno yang melihat federasi Malaysia muncul dari gagasan Inggris untuk membentuk negara Federasi Malaysia yang terdiri dari negara-negara bekas jajahan koloni Inggris, tetapi hal itu tidak dipermasalahkan oleh Soekarno. Namun, pandangan Soekarno mulai berubah saat Tengku Abdul Rahman menuduh Indonesia sebagai biang keladi dari kemerdekaan Kalimantan Utara. Tuduhan tersebut muncul dari tuntutan Presiden Filipina Diosdado Macapagal terhadap wilayah Sabah yang dikatakan sebagai bagian Filipina dan disusul dengan pemberontakan di Kesultanan Brunei. Munculnya tuduhan tersebut yang tidak didasari bukti membuat Soekarno menganggap bahwa itu merupakan serangan pribadi. Adanya faktor-faktor internal dan eksternal menjadikan suatu kejelasan penyebab terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang berujung pada penyelesaian melalui perundingan-perundingan.

B. Kondisi Sosial Politik Islam Di Indonesia

Di Indonesia, gerakan Islam muncul kepermukaan secara menguat dibarengi oleh aktivitasnya yang merambah pada dunia politik. Pertama, terdapat gerakan Islam yang frontal ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, yakni Darul Islam, Tentara Nasional Indonesia (DI/TII) pimpinan Karto Suwiryo. Kedua terdapat pula kebangkitan Islam yang merambah politik secara konstitusional dengan mengikuti kontestasi pemilihan umum. Gerakan ini diwakili oleh Majelis Syura Muslimin Indonesia atau dikenal sebagai Masyumi. Kekuatan politik Masyumi sangat diperhitungkan, dan merupakan salah satu kekuatan dari 4 elemen kekuatan politik di Indonesia yakni, Golongan Nasional, Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia, Komunis dan Islam yang diwakili oleh Masyumi.¹⁵

C. Sikap Moderatisme Partai Politik Islam di Indonesia

Gejolak konflik Malaysia-Indonesia, berujung pada keputusan dilangsungkannya konfrontasi antara keduanya oleh Soekarno. Dari keputusan tersebut, secara tidak langsung memberi dampak pada perpolitikan Islam di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung terlihat dalam panggung perpolitikan Indonesia yang diiringi oleh organisasi masyarakat Islam ketika itu. Organisasi Islam yang cukup berpengaruh, dan memperlihatkan sikap pro dan kontra, yang berujung pada wujud moderatisme partai politik Islam saat itu antara lain:

1. Partai Masyumi

Hubungan partai Masyumi yang tidak hangat dengan Soekarno dan PKI, baik didalam persidangan konstituante UUD 45, yang kemudian berujung pada kecurigaan Soekarno terhadap Islam secara berlebihan membuat ketegangan antar keduanya, sehingga membentuk sikap kurang senang antara Soekarno pada Masyumi. Jika dilihat dari sisi historis pernah menjabat sebagai mantan pengurus pusat Masyumi dan secara langsung terlibat dalam PRRI. Hal ini terlihat didalam pendapat Moh. Natsir (Masyumi) yang mengatakan bahwa tidak pernah percaya kepada janji Soekarno. Natsir mengantisipasi bahwa “segala-galanya mungkin ada, kecuali kebebasan jiwa”. Dalam istilah biasa yang semacam itu kita namakan satu diktatur yang sewenang-wenang. Kritik yang dilakukan oleh Natsir adalah kritik dari orang yang memilih untuk berada di luar sistem pemerintahan, bahkan secara tidak langsung menentangnya. Namun demikian, NU lebih memilih untuk berkoalisi secara langsung dengan Soekarno dan menerima NASAKOM.¹⁶ Menurut perspektif KH. Zaifuddin Zuhri (NU) dan menteri agama dalam masa demokrasi terpimpin mengatakan bahwa, “*perjoeangan NU di zaman demokrasi terpimpin tidak istiqomah dan mengabaikan perjoeangan politik? Itu tidak benar. Tiap perjoeangan di samping faktor kekuatan riil juga faktor strategi dan waktu. Salahlah jika orang cuma mengambil kesimpulan mengapa target ini dan itu tidak berhasil? Mengapa orang tidak mengambil kesimpulan yang lain, misalnya menderita kerugian 25% untuk menghindari kerugian 100% adalah merupakan suatu hasil perjoeangan juga. Ada satu kaidah berjoeang yang diajarkan pesantren: Maa laa hudraku kulluh laa yutraku ba'duhu, apa yang tidak tercapai 100% janganlah ditinggalkan (dibuang) hasil yang sebagian (yang kurang dari 100%). Dengan kata lain janganlah bersikap: Jika tidak berhasil 100% lebih baik*

¹⁵ Saiful Muzani, *Pembangunan dan kebangkitan Islam Di Asia Tenggara* (Jakarta; LP3ES, 1993), 27.

¹⁶ Alim Bathoro, “Redupnya peran politik Islam di masa demokrasi terpimpin (Studi kasus pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno),” *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2 (2) (2018): 24-41.

*tidak berhasil sama sekali. Perjoengan NU di zaman demokrasi dipimpin tetap istiqomah”.*¹⁷

Adanya dua pola perjuangan yang saling berlawanan tersebut membawakan pada dua sayap umat dalam kondisi yang berbeda. Sayap modernis pada akhirnya mengalami sebuah kecelakaan historis yang berujung pada pembubaran, sementara dari sayap pesantren dengan Liga musliminnya tidak hanya dibiarkan hidup, akan tetapi mereka dimasukkan dalam sebuah kerjasama NASAKOM (Nasional, Agama, dan Komunis) yang sudah muncul pada akhir tahun 1960.¹⁸

Pada tahun 1960, gerak gerik dari tokoh politik Islam perlahan mulai dibatasi. Mulai dari yang terlibat PRRI/Permesta ataupun tidak. Adapun demikian, beberapa dari mereka menyerah setelah dijanjikan amnesti pun seperti: Syafruddin Prawiraegara, Mohammad Natsir, dan Boerhanoedin Harahap yang pada akhirnya ditangkap. Mereka mendekam di penjara dari tahun 1961-1967. Pada tahun 1962, diikuti dengan tokoh-tokoh Islam non PRRI yang dipenjarakan, seperti ketua umum Masyumi yang saat itu membubarkan diri, yaitu: Prawoto Mangkusubroto, Mohammad Roem, Kyai A. Mukti, S. Soemarsono, M. Yunan Nasution, E.Z. Muttaqin, KH. Isa Anshary, Ghazali Sjahlan, Hamka, Jusuf Wibisono, Kasman Singodimedjo, Djanamar Adjam, dan HM. Sjaaf. Bahkan Imron Rosjadi yang pernah menjabat sebagai Ketua Pemuda Ansor juga ikut di penjara. Tokoh-tokoh tersebut diperlakukan kejam di penjara. Penyiksaan yang terjadi di penjara memiliki dampak yang besar. Beberapa pihak dari penahanan tersebut dan masyarakat perlahan mulai menyadari bahwa pemerintahan Soekarno dalam zaman demokrasi yang dipimpin merupakan suatu pemerintahan dzalim.¹⁹

Setelah pembubaran Masyumi, kancah perpolitikan Islam diwarnai oleh NU dan Liga Muslimin. Beberapa kebijakan menonjol yang ditetapkan pada waktu itu adalah DWIKORA (Dwi Komando Rakyat), yang kemudian lebih dikenal dengan Ganyang Malaysia. Soekarno dan PKI bekerjasama untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Sementara itu, Angkatan Darat menurut Sundhausen bersikap mendua terhadap ketetapan DWIKORA.²⁰

2. Partai NU

Nahdhatul Ulama (NU) bersikap secara akomodatif dan hidup berdampingan dengan Soekarno. Tidak hanya itu, NU juga bertahan dalam demokrasi dipimpin yang diperintah oleh Soekarno. Anggapan bahwa NU sebagai pendukung utama gagasan Soekarno benar adanya. Adapun demikian, NU menikmati iklim dari perpolitikan yang diciptakan oleh Soekarno dengan konsep

¹⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 2006), 35.

¹⁸ *Ibid*, 35.

¹⁹ Nasir Tamara, "Sejarah politik orde baru," *Jurnal Prisma* No. 5, 1988, 37–82.

²⁰ Ulf Sundhausen, *Politik militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwifungsi ABRI* (Jakarta: LP3ES, 1986), 296-303.

NASAKOMnya. Beberapa tokoh-tokoh NU secara langsung ikut andil dalam hal tersebut, seperti: KH. Achmad Sjaikh, KH. Idham Chalid, dan KH. Saifuddin Zuhri. NU memiliki pandangan bahwa melawan kekuasaan Soekarno jauh lebih bahaya dibandingkan dengan menerima tanpa protes. Maka dari itu, NU mengambil sikap akomodatif untuk menkan resiko buruk seminimal mungkin. Akan menjadi suatu sia-sia jika melawan Soekarno yang saat itu memiliki dukungan Hal yang sia-sia melawan Soekarno yang ketika itu sangat kuat dengan dukungan sepenuhnya militer (Angkatan Darat). Menjadi posisi tidaklah tindakan yang sia-sia, dalam hal ini NU menggunakan kaidah agama yaitu: *akhaff al-dhararayn* yang artinya “memilih resiko yang paling kecil diantara dua resiko”.²¹

Kerja sama NASAKOM dengan partai-partai Islam secara formal dianggap sebuah revolusioner. Hal tersebut disebabkan Islam dipandang sebagai suatu unsur yang penting di NASAKOM dengan NU sebagai penguat utamanya. Maka dari itu, partai NU tidak perlu khawatir akan tersingkir dari logika revolusioner soekarno, asal pandai dalam mencari celah untuk menyesuaikan dengan irama politik NASAKOM. Pada saat itu partai-partai Islam menghadapi isu politik yang lebih banyak meniru gaya NU sebagai kekuatan Islam terbesar yang mampu untuk bertahan di era pemerintahan Soekarno. Pada tahun 1961, awal mula adanya doktrin pesantren yang dianut NU dalam berpolitik sebagai sebuah strategi. Zuhri membantah pendapat bahwa tokoh Islam dalam bahaya. Kemudian dia mengutip pernyataan Presiden Soekarno bahwa, “pemerintah tidak akan membahayakan Islam, namun sebaliknya malah mengagungkan agama”.

3. Gerakan Pemuda Ansor

Pada era 1960-an, tepatnya periode yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Pada waktu itu gejolak politik serta pertarungan ideologi sedang mencapai puncaknya, yaitu antara kaum komunis dan nasionalis. Di era pertarungan ideologi tersebut, Ansor dituntut untuk cermat dalam mengambil keputusan.²² Dikutip dalam Republika²³ KH. Saifuddin Zuhri, seorang tokoh NU, dan Menteri Agama mengatakan bahwa situasi pada saat itu, “Sekitar tahun 1963-1965, gerakan PKI semakin ofensif, melalui propaganda yang penuh agitasi dan demagogi menggerakkan seluruh tenaganya (petani, pemuda, buruh, perempuan, seniman, cendekiawan) untuk bersikap lebih agresif dan militan. Semua itu digerakkan oleh semangat ateisme dan penghinaan terhadap agama. Pada saat itu, PKI seperti mendapatkan angin segar yang dihembuskan sebagai tanda revolusi

²¹ Jainuddin, “Islam dan politik orde lama: dinamika politik Islam pasca kolonial sejak kemerdekaan sampai akhir kekuasaan Soekarno,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3 (2) (2019): 231.

²² Andi Rahman Alamsyah Yulianto and Bayu A., *Gerakan Pemuda Ansor* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

²³ Beggy Rizkiyansyah, “Umat Islam, PKI, Militer: Babak Akhir Jelang September 1965,” *Republika*, 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qhclyi385/umat-islam-pki-militer-babak-akhir-jelang-september-1965>.

yang tengah dikobarkan di RRC (Republik Rakyat Cina), dan di Vietnam.²⁴ Namun permainan politik yang dilakukan oleh PKI tidak berlangsung lama.

Pada tahun 1963 Ansor mengeluarkan sebuah pernyataan dan sikap menolak CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia) pada Presiden, hal tersebut dilakukan agar Presiden memecat Menteri PerguruanTinggian Ilmu pengetahuan yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Tojib Hadiwijaya. Menteri tersebut membatalkan kewajiban untuk pengajaran matakuliah agama di kampus Negeri, dan menolak akan kejadian Korps perdamaian Amerika Serikat. Sikap tegas dikeluarkan oleh Ansor untuk mendukung Menteri PTIP untuk segera mencanangkan kewajiban adanya matakuliah agama di kampus-kampus umum. Karena hal tersebut sesuai dan sejalan dengan Piagam Jakarta, Pancasila, dan menjiwai UUD 45.²⁵ Selain itu, misi dari kedatangan Korps Perdamaian Amerika Serikat, dalam sudut pandang Ansor sejalan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang ada di Indonesia.²⁶

Perkembangan selanjutnya dapat dilihat dari menguatnya posisi dari politik PKI dalam kabinet NASAKOM maupun dalam tingkatan akar rumput. Kalangan rakyat bawah memiliki simpati yang luar biasa pada PKI pada waktu itu. Jika dalam kabinet, NU menjadi kekuatan penyeimbang utama dari PKI, maka para aktivis PKI yang berada dibawah menggerakkan aksi massa di berbagai daerah untuk mengambil alih secara sepihak tanah dari para kelompok yang dianggap sebagai sumber yang menyesengsarakan rakyat banyak, yaitu kelompok yang mereka sebut sebagai setan kota, dan setan desa. Ansor memiliki pandangan bahwa PKI memperoleh jumlah masa yang banyak, yang akan membahayakan NKRI dan menjadi kekuatan penghancur. Sebab, mereka mengadopsi secara ketat ideologi marxisme-komunisme yang diwujudkan dengan berbagai cara yang jauh dari etika berpolitik. Salah satunya seperti agitasi dan propaganda kasar yang dilakukan sampai ke tingkat desa sehingga mengancam ideologi Pancasila dan kohesi sosial. Aksi sepihak PKI secara langsung membuka lagi permusuhan lama PKI dan NU pada Peristiwa Madiun. Pada saat ini keterlibatan Ansor terbagi dalam dua babak: yang pertama, keterlibatan dalam bentuk perselisihan fisik dengan PKI yang terjadi pada tahun 1963-1965, di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur; yang kedua, keikutsertaan Ansor didalam operasi militer penumpasan PKI dan sisa-sisa gerakannya di berbagai wilayah Jawa Timur sesusai tahun 1965.²⁷

²⁴ KH. Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari pesantren* (Yogyakarta; LKiS, 2013).

²⁵ Abdillah Halim, "Politik dan gerakan kebangsaan Pemuda Muslim (Studi terhadap kiprah GP Ansor pada masa kelahiran hingga masa demokrasi parlementer)," *Al-Mabsut* 15 (1) (2021): 47–60.

²⁶ Erwien Kusuma, *Yang Muda Yang Berkiprah (Gerakan Pemuda Ansor dan politik Indonesia masa demokrasi liberal hingga reformasi 1950-2010)*, (Bogor: Kekal Press, 2012), 123.

²⁷ *Ibid*, 126-131.

D. Resolusi Damai Malaysia vs Indonesia

Dalam konflik perebutan wilayah kawasan Sabah dan Sarawak, Indonesia dan Malaysia mengalami suatu ketegangan, dan berbagai tindakan dilakukan oleh kedua negara. Pada akhirnya ketegangan tersebut menimbulkan perselisihan antara keduanya, adapun demikian Presiden Soekarno mengecam Malaysia dengan kalimat “Ganyang Malaysia”.²⁸ Sehingga strategi politik luar negeri Indonesia yaitu jalan keluar berupa diplomasi melalui perundingan damai untuk menyelesaikan persoalan yang berujung pada konflik kedua negara. Diplomasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik kedua negara tersebut, dilakukan berbagai sidang dan melibatkan berbagai unsur internasional, salah satunya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi damai antara Indonesia dan Malaysia dipelopori adanya perundingan yang dilakukan oleh keduanya, diantara perundingan tersebut antara lain:

1. Perundingan I di Tokyo Pada Tahun 1963

Dalam perundingan tersebut Jepang bersedia untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Usaha yang dilakukan oleh Jepang, akhirnya dapat membawa kedua negara untuk berunding dalam menyelesaikan konflik yang dilaksanakan di Tokyo.²⁹ Pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 1963 di Tokyo diadakanlah pertemuan antara Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Melayu. Pertemuan itu membuahkan hasil kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan kedua negara, negara yang bertetangga baik dengan penuh *good will* dan secara bersahabat, akan membatasi diri untuk tidak saling melakukan serangan kata, dan perbedaan pendapat.³⁰

2. Perundingan II di Manila Pada Tahun 1963

Diplomasi Manila merupakan perundingan lanjutan Tokyo yang belum terselesaikan. Perundingan ini dilaksanakan di Manila. Upaya yang dilakukan dalam pertemuan ini yaitu diadakan pertemuan Menteri Luar Negeri tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada bulan Juni 1963. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Filipina menyatakan tidak keberatan dengan dibentuknya Federasi Malaysia, asalkan hal tersebut dilakukan atas dasar hak menentukan nasib mereka sendiri bagi rakyat di wilayah-wilayah yang akan digabungkan, dan ditentukan oleh otoritas yang bebas dan tidak berpihak pada manapun.³¹ Pada intinya hasil perundingan ini untuk memberikan kebebasan kepada rakyat Sabah

²⁸ Chairudin Nur and Ravico, “Ganyang Malaysia: Studi Historis Politik Luar Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966,” *Danadyaksa Historica* 1 (1) (2021): 25–33.

²⁹ Yadi Kusmayadi, “Politik Luar Negeri Republik Indonesia Pada Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966,” *Artefak: History and Education* 4 (1) (2017), 24.

³⁰ Syafaruddin Usman and Isnawati Din, *Ancaman Negeri Jiran: Dari “Ganyang Malaysia” Sampai Konflik Ambalat* (Yogyakarta; Media Pressindo, 2009), 36.

³¹ Arifin Sn Efantino F, *Ganyang Malaysia* (Yogyakarta; Bio Pustaka, 2009), 42.

dan Sarawak untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui pemungutan suara, dalam hal ini akan diawasi oleh pihak PBB. Namun demikian, hasil dari kesepakatan tersebut, pihak Malaysia menjelang beberapa minggu sebelum perundingan Manila membentuk sebuah Federasi Malaysia, hal tersebut menjadikan Malaysia telah melanggar kesepakatan di Manila, dan memicu kemarahan dari Indonesia dan konflik keduanya kembali memanas.

3. Perundingan III di Manila Pada Tahun 1964

Diplomasi untuk menyelesaikan konflik kedua negara digelar kembali di Manila pada tahun 1964. Presiden Macapagal yang setuju dengan gagasan Thanat kemudian juga menyampaikan hal itu kepada pihak Indonesia saat ia mengadakan pertemuan dengan Soekarno, yang saat itu berkunjung ke Manila pada tanggal 7 Januari 1964.³² Mengingat forum musyawarah Maphilindo dibentuk sebagai suatu wadah di mana memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, pemerintah RI berusaha memanfaatkan forum tersebut sebaik mungkin untuk menyelesaikan persoalan dengan Malaysia.³³

4. Perundingan IV di Bangkok Pada Tahun 1964

PBB yang melihat bahwa konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia belum terselesaikan, kemudian pihak PBB secara langsung melibatkan diri untuk membantu dalam penyelesaian konflik tersebut, hal tersebut lakukan dengan cara menunjuk Thailand menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan perundingan. Perundingan tersebut berupaya memecahkan masalah sengketa Malaysia dilakukan dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri Indonesia, Filipina, dan Malaysia di Bangkok dari tanggal 5 sampai 10 Februari 1964. Pertemuan itu tidak mencapai sebuah hasil, karena perbedaan penafsiran tentang gencatan senjata.³⁴ Malaysia memiliki pandangan bahwa dalam gencatan senjata yang dilakukan oleh Indonesia segera di hentikan serta dilanjutkan penarikan tentara Indonesia dari wilayah Malaysia. Sedangkan Indonesia berpendapat bahwa gencatan senjata tersebut bisa di hentikan, tetapi untuk penarikan tentara Indonesia yang berada di Malaysia ditolak secara mentah-mentahan dan tidak akan dilakukan, bagi Indonesia menarik tentara akan dilakukan jikalau diplomasi itu berhasil.

5. Perundingan V di Bangkok Pada Tahun 1964

Dilakukan dua kali perundingan di Bangkok bertemakan pembahasan yang sama mengenai gencatan senjata yang dilakukan Indonesia, dan penarikan pasukan sama-sama tidak membuahkan hasil dan jalan keluar untuk memecahkan masalah.

³² Linda Sunarti, "Politik luar negeri Malaysia terhadap Indonesia 1957-1976: Dari konfrontasi menuju kerjasama," *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah* 2 (1) (2014), 158.

³³ M.D. Poesponegoro and N. Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta; Balai Pustaka, 2010), 464.

³⁴ *Ibid*, 464.

Hal itu dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara kedua negara dan tidak saling percaya.³⁵ Perundingan ini terjadi pada tanggal 2 Maret 1964.

6. Perundingan VI di Tokyo Pada Tahun 1964

Pada perundingan kali ini Soekarno dan Tengku Abdul Rahman hadir. Dalam perundingan tersebut Tengku Abdul Rahman menentukan syarat bahwa gerilyawan Indonesia harus ditarik dari Malaysia untuk dapat memulai perundingan lanjutan. Namun syarat yang diajukan Tengku Abdul Rahman tidak bisa dipenuhi oleh Indonesia dan perundingan gagal. Perundingan terakhir dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara Soekarno, Tengku Abdul Rahman, dan Diosdado Macapagal di Tokyo bulan Juni 1964 juga mengalami kegagalan dan tidak membuahkan hasil yang sesuai.³⁶ Adapun demikian, kegagalan dari diplomasi tersebut menyebabkan konfrontasi berlangsung secara terus menerus dan diplomasi ini menjadi kegagalan yang terakhir.

7. Perundingan VII di Bangkok Pada Tahun 1966

Perundingan ini berlangsung pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1966 oleh pemerintah RI (Republik Indonesia) dan Malaysia, setelah ditandatanganinya hasil dari perundingan tersebut, maka dari itu berakhirlah segala bentuk konfrontasi yang pernah terjadi antara kedua negara yang masih serumpun. Tun Abdul Razak yang menjadi ketua dan perwakilan langsung dengan Adam Malik yang mengetuai rombongan Indonesia di Bangkok. Setelah berunding selama tiga hari, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1966, kedua belah pihak telah mencapai persetujuan terhadap tiga prinsip yang memperbolehkan persoalan antara kedua negara diselesaikan. 1) mereka menyetujui untuk menyelesaikan permusuhan antara Malaysia dan Indonesia; 2) mereka menyetujui untuk memulihkan semula hubungan diplomatik setelah menandatangani perjanjian; dan 3) menyediakan peluang secepat mungkin untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak sama, mereka ingin terus bersatu dalam Malaysia.³⁷ Perundingan di Bangkok ini menghasilkan perjanjian yang disebut Perjanjian Bangkok, yang berisikan ketetapan sebagai berikut: *Pertama*, rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia; *Kedua*, pemerintah menyetujui pemulihan hubungan diplomatik antara kedua belah pihak; *Ketiga*, Tindakan perumusan antara kedua negara akan dihentikan.³⁸ Penyelesaian konflik antara Indonesia dan Malaysia

³⁵ Ali Maksum, *Menyingkap tabir hubungan Indonesia-Malaysia: Menguak fakta dibalik berbagai sengketa dua Negara* (Yogyakarta; The Phinisi Press, 2017), 209.

³⁶ Kusmayadi, "Politik Luar Negeri Republik Indonesia Pada Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966", 25.

³⁷ Nur and Ravico, "Ganyang Malaysia: Studi Historis Politik Luar Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966", 32.

³⁸ Arifin Sn Efantino F, *Ganyang Malaysia* (Yogyakarta; Bio Pustaka, 2009), 4285-86.

pada perundingan Bangkok ini ditandai dengan penandatanganan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia sebagai akhir.

Simpulan

Pertikaian antara Indonesia dan Malaysia dalam konflik wilayah Sabah dan Sarawak pada akhirnya berujung pada perselisihan antara keduanya, tepatnya pada masa Presiden Soekarno mengecam Malaysia dengan kalimat yang berbunyi “Ganyang Malaysia”. Pasca kecaman yang dilakukan oleh Soekarno terhadap Malaysia, secara tidak langsung mempengaruhi kondisi sosial politik Islam di Indonesia. Pada saat terjadinya resolusi konflik antara Indonesia dan Malaysia, kondisi politik Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Perbedaan ideologi menjadi pemicu adanya ketegangan politik di Indonesia, akibat dari resolusi konflik antar negara memberi dampak pada organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang memiliki pengaruh dalam penyelesaian konflik politik internal. Beberapa organisasi masyarakat yang memiliki peran dan menunjukkan sikap moderatisme politik Islam adalah NU dan Pemuda Anshor. Jika dilihat dari perkembangan partai politik saat itu, ada Partai Masyumi yang menentang kebijakan Soekarno, dan pada akhirnya organisasi ini dibubarkan. Kemudian Partai NU dan Gerakan Pemuda Ansor mendukung kebijakan Soekarno, sehingga organisasi ini masih tetap hidup dan memperlihatkan sisi moderatnya hingga akhir pemerintahan Orde Lama. Dengan berbagai kemelut internal tersebut, Indonesia sebagai negara demokrasi terpimpin saat itu juga mengalami konflik dengan negara serumpun yaitu Malaysia yang berawal dari konflik wilayah Sabah dan Sarawak. Resolusi konflik tersebut menyebabkan pertikaian antara Malaysia dan Indonesia. Meskipun pada akhirnya resolusi konflik antar dua negara tersebut berakhir dengan resolusi damai. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam resolusi damai antar dua negara yaitu dengan melakukan politik luar negeri. Maka resolusi damai dengan Malaysia dapat capai melalui perundingan-perundingan dari tahun 1963-1966.

Daftar Sumber

Buku

- Dinas Sejarah Militer TNI-AD. "SEJARAH TNI-AD 1945-1973: Peran TNI-AD dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Bandung: Dinas Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 1985, 1985.
- Disjarahad. *Buku sejarah dokumenter: Konfrontasi terhadap Negara Federasi Malaysia dan Dwikora*. Bandung: Dinas Pusat Sejarah TNI, 1975.
- Efantino F, Arifin Sn. *Ganyang Malaysia*. Yogyakarta: Bio Pustaka, 2009.
- Hadiningrat, Kusuma. *Sejarah operasi gabungan dalam rangka Dwikora*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971.
- Kusuma, Erwien. *Yang Muda Yang Berkiprah: Gerakan Pemuda Anzor Dan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal Hingga Reformasi (1950-2010)*. Bogor: Kekal Press, 2012.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang perdebatan dalam konstituante*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Maksum, Ali. *Menyingkap tabir hubungan Indonesia-Malaysia: Menguak fakta dibalik berbagai sengketa dua negara*. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017.
- Mengko, Diandra Megaputri. "Intelijen Dan Konfrontasi Indonesia-Malaysia." In *Intelijen dan politik era Soekarno*, edited by: Ikrar Nusa Bhakti and dkk., 103–32. Jakarta: LIPI Press, 2018.
- Muzani, Saiful. *Pembangunan dan kebangkitan Islam Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1993.
- Poesponegoro, M.D., and N. Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulistiyono, Bambang Bahagia. *Konflik Indonesia-Malaysia dalam perspektif kebangsaan 1963-2010*. Jakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Sundhaussen, Ulf. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwifungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Usman, Syafaruddin, and Isnawati Din. *Ancaman Negeri Jiran: Dari "Ganyang Malaysia" Sampai Konflik Ambalat*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Yulianto, Andi Rahman Alamsyah, and Bayu A. *Gerakan Pemuda Anzor*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Zuhri, KH. Saifuddin. *Berangkat dari pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2013.

Jurnal

- Bathoro, Alim. "Redupnya peran politik Islam di masa demokrasi terpimpin: Studi kasus pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno". *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2 (2) (2018): 24–41.

- Esposito, John L. "Moderate Muslims: A Mainstream of Modernists, Islamists, Conservatives, and Traditionalists." *Amerika Journal of Islamic Social Sciences* 22, no. 3 (2005).
- Halim, Abdillah. "Politik dan gerakan kebangsaan pemuda Muslim: Studi terhadap kiprah GP Ansor pada masa kelahiran hingga masa demokrasi parlementer". *Al-Mabsut* 15 (1) (2021): 47–60.
- Jainuddin. "Islam dan politik orde lama: Dinamika politik Islam pasca kolonial sejak kemerdekaan sampai akhir kekuasaan Soekarno". *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3 (2) (2019): 225–43.
- Kusmayadi, Yadi. "Politik luar negeri Republik Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966". *Artefak: History and Education* 4 (1) (2017).
- Nur, Chairudin, and Ravico. "Ganyang Malaysia: Studi historis politik luar Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966." *Danadyaksa Historica* 1 (1) (2021): 25–33.
- Sunarti, Linda. "Politik luar negeri Malaysia terhadap Indonesia 1957-1976: Dari konfrontasi menuju kerjasama." *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah* 2 (1) (2014).
- Tamara, Nasir. "Sejarah Politik Orde Baru." *Jurnal Prisma No. 5*, 1988, 37–82.

Skripsi

- Ajingga, Deshinta Nindya. "Peran angkatan udara Republik Indonesia dalam operasi Ganyang Malaysia Di Kalimantan Tahun 1964-1966". Universitas Sebelas Maret, 2016.

Website

- Rizkiyansyah, Beggy. "Umat Islam, PKI, Militer: Babak Akhir Jelang September 1965." Replubika, 2020.
<https://www.republika.co.id/berita/qhclyi385/umat-islam-pki_militer-babak-akhir-jelang-september-1965>